



Analisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Pelayanan Publik Indonesia

Ayu Geby Gisela Syaputri¹, Muhammad Bahrul Ulum^{2*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

²Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang, Indonesia

Email: ayu_geby@um-palembang.ac.id, muhammadbahrul@fe.unsri.ac.id

(* : coresponding author)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dengan Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Pelayanan Publik di Indonesia dari tahun 2014 – 2023, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda atau metode Ordinary Least Square. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Pelayanan Publik sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Pelayanan Public, pengaruh signifikan dan tidaknya suatu variabel dipengaruhi oleh data tahunan yang tertera. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka diperlukan adanya peranan koordinasi perundang – undangan terhadap belanja pelayanan public sehingga dalam hal ini terciptalah pelayanan public yang baik untuk masyarakat.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Pegawai, Belanja Modal

Abstract

The Purpose of this study was to determine the Effect of Economic Growth with indicator Gross Domestic Regional Product (GDRP) and total population on the Public Service Spending in Indonesia start from 2014 – 2023, this study uses panel data regression or Ordinary Least Square. In this study was concluded that Gross Domestic Product have a positive and not significant on the Public Service Spending whereas Total Population have a positive and significant on the Public Service Spending, the effect significant or not significant all variables can be affected by annual data on the listed. As the Total Population was increases, it is necessary have a role play legislation on the Public Service Spending so that created good Public Service Spending for public.

Keywords: Economic Growth, Total Population, Gross Domestic Product, Public Service Spending, Employee Expenditure, Capital Expenditure

1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan [1]. Untuk memacu peningkatan pelayanan publik, Kemen Keu RB menerapkan kebijakan bahwa tahun 2024 adalah tahun inovasi pelayanan publik. Seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat membuat suatu ide kreatif atau jawaban terhadap cara kerja/metode pelayanan publik [2]. Kemen Keu RB mengumpulkan dan menilai inovasi-inovasi yang telah dilakukan di sejumlah instansi di seluruh Indonesia. [3]

Belanja Pelayanan Publik adalah belanja yang berupa belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). [4].

Undang - Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 tentang Keuangan Negara, Pasal 11 ayat (5), mengatur mengatur pengelompokan anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi [6]. Fungsi ini terdiri dari 11 fungsi yang menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebelas fungsi pemerintah tersebut meliputi: (1) fungsi pelayanan umum, (2) fungsi pertahanan, (3) fungsi ketertiban dan keamanan, (4) fungsi ekonomi, (5) fungsi lingkungan hidup, (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum, (7) fungsi kesehatan, (8) fungsi pariwisata dan budaya, (9) fungsi agama, (10) fungsi pendidikan, dan (11) fungsi perlindungan sosial. [7].

Pembangunan di bidang ekonomi harus dilakukan secara bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan agar daya beli masyarakat meningkat secara merata. Pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat [8].

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi [9]. Badan Pusat Statistik, 2018 menyebutkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) Indonesia adalah Negara yang memiliki banyak pulau [11]. Setiap pulau atau wilayah memiliki karakteristik dan kegiatan



ekonomi yang berbeda-beda. Selama ini, kegiatan perekonomian terpusat pada pulau Jawa, sehingga terjadi ketimpangan antara daerah Jawa dan diluar Jawa [12].

Hal ini dikarenakan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Secara umum, konsep ekonomi dikenal dua kebijakan ekonomi yang utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal [13][Ramadhani, 2024]. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dapat menaikkan, atau lebih umumnya adalah ukuran dari sektor publik, adalah pengeluaran pemerintah dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang [14]. Penelitian ini bermaksud menganalisis pengaruh PDRB dan jumlah Penduduk terhadap belanja pelayanan publik Indonesia dan pengaruhnya pada kesejahteraan masyarakat baik yang diluar pulau jawa ataupun yang dipulau jawa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Periode 2006 – 2015 di Indonesia, dengan data tahunan yang berasal dari publikasi-publikasi resmi, Badan Pusat Statistik, dan kepustakaan serta literatur-literatur yang berkaitan dan mendukung penulisan ini. Objek dalam penelitian ini adalah PDRB, Jumlah Penduduk, dan belanja Pelayanan Publik di Indonesia, ruang lingkup penelitian untuk mengkaji sejauh mana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Pelayanan Publik di Indonesia. Metode ekonometrik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana (Ordinary Least Square). Analisis regresi adalah studi ketergantungan dari variabel dependen pada satu atau lebih variabel lain, yaitu variabel independen [15]. Dalam analisis ini dilakukan dengan bantuan program Eviews 8 dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya.

Adapun model dasar analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu$$

Dari model dasar di atas jika dikaitkan dengan variabel yang peneliti lakukan maka dapat ditulis dengan formula :

$$DA = \beta_1 PDRB + \beta_2 JP + \mu$$

Keterangan:

- BPP = Belanja Pelayanan Publik
- PDRB = Produk Domestik Regional Bruto
- JP = Jumlah Penduduk
- μ = Term of error.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Perkembangan PDRB, Jumlah penduduk dan belanja pelayanan publik di Indonesia Tahun 2014 – 2023

Tahun	Total PDRB	Jumlah Penduduk	Total Belanja Publik
2014	3.339.216.800.00	227,7 00,000	427 598,000
2015	3.949.321.400.00	231,0 00,000	504.623,400
2016	4.954 028.900.00	234,2 00,000	693.356,000
2017	5 603 900,000.00	237,5 00,000	628.812,400
2018	6 422 900,000.00	240,7 00,000	697.406,400
2019	7,287,635,300.00	243,8 00,000	883.721,900



2020	7,727,083,400.00	246,9 00,000	1.069.534,500
2021	8,158,193,700.00	249,9 00,000	1.154.380,900
2022	8,568,115,600.00	254,9 00,000	1.280.368,600
2023	8,976,931,500.00	255,0 00.000	1.379.875,300

Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah)

Secara teori, semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh kabupaten / kota [16]. Dengan semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh pemerintah pusat akan lebih besar untuk meningkatkan berbagai potensi lokal di daerah tersebut untuk kepentingan pelayanan public [17]. Yang menjadi fenomena unik dari penelitian ini adalah seberapa besar kontribusi pemerintah akan belanja pelayanan public terhadap PDRB dan jumlah penduduk yang semakin meningkat, dan dapat dilihat juga pada tabel tahun 2008 belanja pelayanan public mengalami penurunan sedangkan PDRB dan jumlah penduduk jumlahnya semakin meningkat hal ini mengindikasikan adanya fenomena / masalah bagi pemerintah daerah dalam penetapan belanja karena tidak sesuai dengan peningkatan PDRB dan jumlah penduduk. Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 1, perkembangan PDRB, jumlah penduduk, dan belanja pelayanan publik menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Namun, beberapa temuan menarik dapat diperoleh dari analisis data sebagai berikut:

Peningkatan PDRB

PDRB mengalami pertumbuhan yang signifikan dari Rp3,3 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp8,9 triliun pada tahun 2023. Ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam satu dekade terakhir.

Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk juga meningkat dari 227,7 juta pada tahun 2014 menjadi 255,0 juta pada tahun 2023. Peningkatan jumlah penduduk ini berimplikasi pada kebutuhan yang lebih besar terhadap layanan publik.

Fluktuasi dalam Belanja Pelayanan Publik

Belanja pelayanan publik mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun terdapat beberapa tahun di mana belanja tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Contohnya, pada tahun 2017, belanja pelayanan publik menurun dibandingkan dengan tahun 2016, meskipun PDRB dan jumlah penduduk tetap meningkat.

4. PENGUJIAN

Berdasarkan dari hasil regresi yang telah dilakukan, maka dapat dilihat seberapa besar pengaruh variabel independen PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap variabel dependen Belanja Pelayanan Publik. maka digunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistika tahun 2014 sampai 2023 dalam Tahunan. Data sekunder tersebut diestimasi dengan analisis regresi linier berganda dan diolah menggunakan program Eviews 8. Adapun hasil dari regresi ini diperoleh berbagai koefisien untuk setiap variabel yakni sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil pengujian

Dependent Variable: BELANJA

Method: Least Squares

Date: 20/12/24 Time: 14:18

Sample: 2014 2023

Included observations: 10

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 3.0000)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-139.9993	41.05958	-3.409662	0.011293
PDRB	0.219555	0.276113	0.795161	0.452633
PENDUDUK	8.058555	2.445349	3.295461	0.013202



R-squared	0.964036	Mean dependent var	20.51649
Adjusted R-squared	0.953761	S.D. dependent var	0.400886
S.E. of regression	0.086202	Akaike info criterion	-1.820898
Sum squared resid	0.052016	Schwarz criterion	-1.730123
Log likelihood	12.10449	Hannan-Quinn criter.	-1.920479
F-statistic	93.82184	Durbin-Watson stat	2.091310
Prob(F-statistic)	0.000009	Wald F statistic	497.5912
Prob(Wald F-statistic)	0.000000		

Dari hasil uji tersebut diperoleh hasil estimasi regresi linier berganda dengan persamaan model regresi sebagai berikut:

$$BPP = - 139.9993 + 0.219555PDRB + 8.058555JP + \epsilon$$

Berdasarkan hasil regresi di atas dapat dijelaskan pengaruh variabel PDRB, Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut:

1. PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja Pelayanan Publik. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi PDRB, yaitu sebesar 0.219555. Artinya setiap kenaikan Jumlah PDRB sebesar 1% Maka Belanja Pelayanan Publik naik sebesar 21.9 Jutaan Rupiah, ceteris paribus.

Jumlah Penduduk Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Pelayanan Publik. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi Jumlah Penduduk Indonesia, yaitu sebesar 8.058555 Artinya setiap kenaikan pengeluaran Investasi sebesar 1% maka Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 805 Jutaan Rupiah, ceteris paribus. hasil regresi linier berganda yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014-2023 dan diolah menggunakan program Eviews 8, diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$BPP = - 139.9993 + 0.219555PDRB + 8.058555JP + \epsilon$$

Hasil estimasi menunjukkan beberapa temuan penting:

1. **PDRB berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja pelayanan publik.**
 Ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0.219555 dengan nilai probabilitas 0.452633 (>0.05), yang berarti bahwa meskipun PDRB meningkat, pengaruhnya terhadap belanja pelayanan publik tidak terlalu kuat dan tidak signifikan secara statistik.
 Artinya, setiap kenaikan PDRB sebesar 1% hanya meningkatkan belanja pelayanan publik sebesar 21.9 juta Rupiah, dengan asumsi variabel lainnya tetap (ceteris paribus).
2. **Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pelayanan publik.**
 Koefisien regresi sebesar 8.058555 dengan nilai probabilitas 0.013202 (<0.05), menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk secara signifikan meningkatkan belanja pelayanan publik.
 Artinya, setiap kenaikan jumlah penduduk sebesar 1% akan meningkatkan belanja pelayanan publik sebesar 805 juta Rupiah, dengan asumsi variabel lainnya tetap (ceteris paribus).
3. **Kualitas model regresi:**
 Nilai R-squared sebesar 0.964036 menunjukkan bahwa 96.4% variasi dalam belanja pelayanan publik dapat dijelaskan oleh PDRB dan jumlah penduduk.
 Nilai F-statistik sebesar 93.82184 dengan probabilitas 0.000009 menunjukkan bahwa secara keseluruhan model regresi yang digunakan signifikan.



5. KESIMPULAN

Belanja pelayanan publik lebih dipengaruhi oleh jumlah penduduk dibandingkan dengan PDRB. Pemerintah perlu lebih mempertimbangkan faktor demografi dalam menyusun kebijakan pengeluaran publik. Meskipun PDRB meningkat, peningkatan ini tidak otomatis meningkatkan belanja pelayanan publik. Hal ini bisa disebabkan oleh kebijakan fiskal yang tidak sepenuhnya mengalokasikan pertumbuhan ekonomi ke dalam belanja pelayanan publik. Pemerintah perlu lebih konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pelayanan publik seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk agar layanan publik tetap optimal. Dengan adanya analisis ini, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam merencanakan anggaran dan mengoptimalkan belanja pelayanan publik guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

REFERENCES

- [1] A. Nova and A. R. Daud, "Dilema Kebijakan Fiskal Di Indonesia: Dampak Kebijakan Ekspansi Dan Kontraksi Fiskal Terhadap Beberapa Indikator Ekonomi," *Sosiohumaniora*, vol. 8, no. 1, p. 52, 2006, doi: 10.24198/SOSIOHUMANIORA.V8I1.5361.
- [2] A. Syukriy and A. J. Andra, "Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah," *Simp. Nas. Akunt. 9 Padang*, no. June, pp. 23–26, 2006.
- [3] A. F. Daulay, M. Arfan, and H. Basri, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Keuangan, dan Pengawasan Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe," *J. Magister Akunt. Pasca Sarj. Univ. Syiah Kuala*, vol. 4, no. 3, pp. 39–48, 2015.
- [4] D.-T. Bui, "Fiscal sustainability in developing Asia – new evidence from panel correlated common effect model," *J. Asian Bus. Econ. Stud.*, vol. 27, no. 1, pp. 66–80, 2019, doi: 10.1108/jabes-01-2019-0001.
- [5] "Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008."
- [6] A. P. Laksana and B. D. Handayani, "PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGAWASAN FUNGSIONAL, DAN PELAPORAN KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK DI KABUPATEN BATAN," *Account. Anal. J.*, vol. 3, no. 4, pp. 457–465, 2014.
- [7] R. Riantarno and N. Azlina, "Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)," *Pekbis J.*, vol. 3, no. 3, pp. 560–568, 2011.
- [8] J. N. Inekwe, Y. Jin, and M. R. Valenzuela, "Financial conditions and economic growth," *Int. Rev. Econ. Financ.*, vol. 61, pp. 128–140, May 2019, doi: 10.1016/J.IREF.2019.02.001.
- [9] M. K. Ocran, "Fiscal policy and economic growth in South Africa," *J. Econ. Stud.*, vol. 38, no. 5, pp. 604–618, 2011, doi: 10.1108/01443581111161841.
- [10] Bps.go.id, "Badan Pusat Statistik," www.bps.go.id.
- [11] E. D. Purnamasari, B. Setiawan, and M. B. Ulum, "Macroeconomic Indicators and Stock Market Development on Economic Growth: Empirical Evidence from ASEAN Countries," 2020. doi: 10.29259/sijdeb.v3i4.271-282.
- [12] H. H. Sawitri, "Dampak defisit anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi," *Organ. dan Manaj.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2006.
- [13] M. A. Ramadhani, "Pengaruh Defisit Anggaran, Pengeluaran Pemerintah Dan Hutang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus 6 Negara Asean Tahun 2003-2012)," *J. Ilm.*, 2014.
- [14] B.-C. Egbide and G. Agbude, "Good Budgeting and Good Governance: A Comparative Discourse," *SSRN Electron. J.*, no. 2002, pp. 49–59, 2018, doi: 10.2139/ssm.2478725.
- [15] A. M. Ginting, "Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi Pulau Jawa," *Kajian*, vol. 17, no. September, p. 357, 2012.
- [16] R. Saputra, "Penerapan Hukum Wagner di Indonesia," *J. Ekon. Pembang.*, vol. 1, no. 1, p. 3, 2022.
- [17] V. Agustina and P. Sembiring, "Analisis Belanja Pelayanan Publik di Sumatera Selatan," *J. Akuntansi, Ekonomi dan Manaj. Bisnis*, vol. 2, no. 1, p. 4, 2021.